

## **BAB IV**

### **FAKTOR KEPENTINGAN INDONESIA MENJALIN KERJASAMA EKONOMI DENGAN TURKI**

Dalam bab ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia menjalin kerjasama di bidang ekonomi dengan Turki yaitu faktor kepentingan ekonomi dan faktor kepentingan militer.

#### **A. Faktor Kondisi Politik Dalam Negeri**

Apabila melihat situasi kondisi politik dalam negeri, maka terdapat korelasi hubungan antara pengambil keputusan dengan aktor-aktor politik dalam negeri maupun kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah terdapat perjanjian kerjasama dan Undang-undang kerjasama dengan Turki, serta mengenai kondisi ekonomi politik Indonesia dan hubungannya dengan kerjasama dengan Turki.

Seperti yang diketahui, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Turki sejak tahun 1950 dengan didirikannya kantor diplomatik antar kedua negara. Kemudian setelahnya berbagai kerjasama mulai dilakukan di berbagai bidang seperti bidang politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Kerjasama yang telah dilakukan antar kedua negara telah melewati masa-masa periode yang panjang, telah mengalami pergantian kepemimpinan, mengalami

dinamika politik yang terjadi di dalam negeri, yang kemudian tidak lantas membuat hubungan bilateral Indonesia-Turki menjadi putus karena kedua negara sama-sama menjaga untuk saling berkomitmen.

### **1. Terdapat Perjanjian Kerjasama Bilateral dan UU Kerjasama Industri Pertahanan**

Hubungan yang terus terjalin antara kedua negara juga dipengaruhi dan didukung oleh kondisi politik dalam negeri masing-masing negara. Di Indonesia sendiri telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti saat pemerintahan Indonesia menjalin kerjasama dengan Turki di bidang industri pertahanan tahun 2010, Indonesia telah mendapatkan dukungan dari DPR dengan dibuatkannya UU No 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Industri Pertahanan dengan Turki. Pembahasan mengenai RUU kerjasama industri pertahanan dilakukan antara DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, serta beberapa pejabat dari kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan serta instansi terkait lainnya.

Adapun poin pokok pembahasan mengenai RUU kerjasama industri pertahanan dengan Turki meliputi penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk penelitian bersama, pengembangan produksi dan proyek modernisasi, bantuan timbal balik dalam bidang produksi dan pengadaan produk industri dan jasa pertahanan, penjualan produk akhir, pertukaran informasi ilmiah dan teknis, partisipasi dalam pameran industri pertahanan, serta penjualan atau pembelian yang saling menguntungkan. Selain itu kerjasama juga akan membentuk komite bersama dalam industri

pertahanan. Kedua negara juga diwajibkan untuk saling melindungi hak atas kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia. Komitmen para pihak untuk mengedepankan kepentingan, keamanan dan integrasi masing-masing negara. Apabila terdapat sengketa, diselesaikan secara damai melalui negosiasi kedua belah pihak. (Aprilia, 2014)

Adapun pembahasan mengenai RUU tentang kerjasama industri pertahanan dengan Turki dilakukan pada masa akhir jabatan Presiden SBY, kemudian baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan disetujuinya RUU tentang kerjasama industri pertahanan dengan Turki yang kemudian menjadi UU, maka telah terbentuk payung hukum bagi kedua negara dalam upaya untuk mengembangkan kapasitas pertahanan masing-masing negara. Adanya UU kerjasama industri pertahanan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk lebih serius dalam menjaga hubungan bilateral dengan Turki dan akan berupaya untuk menghasilkan nilai positif bagi kedua negara.

## **2. Kondisi ekonomi politik dalam negeri Indonesia**

Seperti yang diketahui, semenjak Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Terdapat sejumlah janji yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dia pimpin. Dalam beberapa pernyataanya selama kampanye, Presiden Jokowi menjanjikan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 7 persen pada tahun 2018. Akan tetapi, janji tersebut kemudian telah di

revisi menjadi 6,1 persen pada awal november 2016, dan turun lagi menjadi 5,6 persen (Ginanjar, 2017).

Kemudian pada tahun 2016, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah proyeksi ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Dimana dalam RAPBN-P tersebut ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 5,1 persen. Adapun sejumlah hal yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dikarenakan terjadinya perlambatan ekonomi global dan pelemahan harga komoditas dunia, khususnya komoditas minyak mentah. Untuk itu, angka pertumbuhan 5,1 persen tersebut dianggap oleh pemerintah sebuah angka yang cukup realistis.

Dikarenakan target pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat tercapai, pemerintahan Jokowi kemudian mendapat banyak tekanan dari berbagai pihak. Salah satunya berasal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sejumlah anggota DPR RI kemudian memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah untuk bisa berinovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. DPR RI kemudian menekankan pentingnya terobosan yang baru dalam mengatasi perlambatan perekonomian dan memfokuskan pada peningkatan nilai ekspor serta investasi sebagai solusi dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. (Embu, 2017)

Untuk itu, selama pemerintahan Jokowi telah melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi. Salah satunya

adalah dengan membuat kebijakan dengan memangkas anggaran belanja negara yang tidak produktif menjadi produktif, melakukan program Tax Amnesty, serta menggenjot ekspor dan investasi. Namun dalam kenyataannya, program pemotongan anggaran dan program tax amnesty belum cukup mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah kemudian akan mulai memfokuskan pada sektor ekspor maupun investasi dengan negara lain. di bidang ekspor, pemerintah berupaya untuk mencari pasar-pasar baru yang potensial dan mengevaluasi kerjasama perdagangan dengan negara lain yang mengalami penurunan.

Salah satu hal yang kemudian menjadi sorotan adalah mengenai perdagangan dan Investasi Indonesia dengan Turki yang mengalami penurunan. Penurunan perdagangan dan investasi terjadi disebabkan oleh sejumlah regulasi yang ada di Indonesia terbilang tidak cukup mendukung perdagangan dan investasi dengan sejumlah negara, seperti penerapan bea cukai import yang ada di Indonesia serta regulasi mengenai investasi yang cukup rumit. Untuk itu, DPR kemudian menyarankan kepada pemerintah untuk mengkaji kembali terkait peraturan yang menghambat perdagangan maupun investasi kearah lebih positif (Sikumbang, 2017).

Melakukan peningkatan perekonomian Indonesia merupakan hal yang penting. Pemerintah harus mampu mencari alternatif ekonomi baru serta meningkatkan pasar Indonesia di luar negeri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan ekonomi yang positif juga harus didukung dengan sejumlah regulasi atau peraturan yang baik untuk menciptakan iklim yang baik. Perlu adanya kerjasama yang baik antara

pemerintah dengan DPR selaku pemegang kekuasaan politik dalam negeri untuk terus menciptakan kondisi yang stabil terhadap hubungan ekonomi dengan negara lain.

## **B. Faktor Kapabilitas Ekonomi dan Militer**

Salah satu yang menjadi faktor terjalinnya hubungan antar negara adalah kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi dan Militer adalah sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Turki untuk meningkatkan nilai investasi, perdagangan dan pengembangan industri pertahanan di Indonesia.

### **1. Meningkatkan nilai investasi dan perdagangan Turki di Indonesia**

Salah satu alasan yang mampu memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Turki adalah dengan menjalin kerjasama di bidang ekonomi khususnya terkait dengan investasi dan perdagangan. Kerjasama di bidang investasi dan perdagangan ini sangat penting mengingat dampaknya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, hubungan Indonesia-Turki selama beberapa tahun ini menunjukkan nilai negatif, hal ini dibuktikan dengan semakin menurunnya nilai investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Turki.

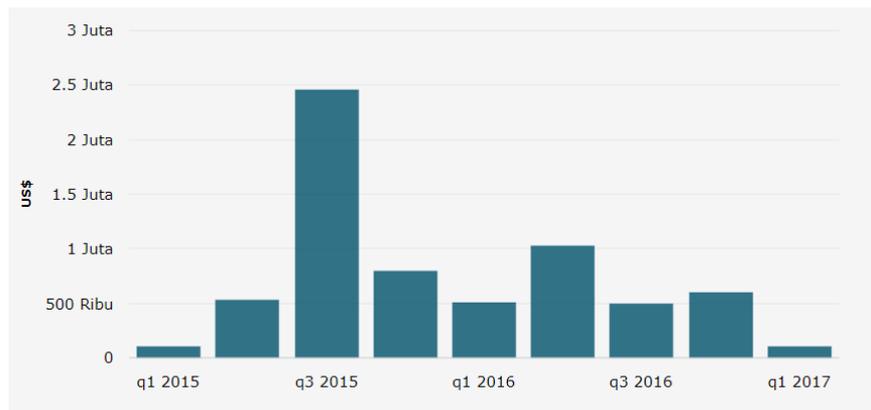
Pada tahun 2010 diketahui terdapat ada sekitar 14 perusahaan Turki yang berinvestasi di Indonesia yang mencapai total investasi US\$100 juta. Dalam kurun waktu dekat, investasi kedua negara mengalami peningkatan. Nilai investasi Turki di Indonesia pada tahun 014 mencapai US\$64,1 juta dalam 29 proyek. Angka tersebut mengalami

peningkatan yang cukup signifikan mencapai US\$11,7 juta pada tahun 2013. (detikFinance, 2010)

Namun, apabila melihat data pada tahun 2015-2017 nilai investasi Turki ke Indonesia tidak begitu stabil kearah peningkatan. Realisasi nilai investasi asing (FDI) Turki ke Indonesia pada triwulan pertama 2017 hanya sebesar US\$100 ribu. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa nilai investasi Turki ke Indonesia Tertinggi sebelumnya terjadi pada kuartal III 2015, yakni mencapai lebih dari US\$ 2 juta. Tahun berikutnya terus menurun bahkan tidak sampai US\$ 1 juta setiap kuartalnya. Meski demikian, pada 2016 Turki masih masuk dalam daftar 50 besar negara dengan nilai investasi terbesar ke Indonesia, yakni US\$ 2,7 juta dan berada di peringkat ke 43 dengan 61 proyek. (KataData, 2017)

Gambar 4.1

Nilai Investasi Asing asal Turki ke Indonesia 2015-2017



Sumber : Data BKPM, diolah oleh Katadata Indonesia

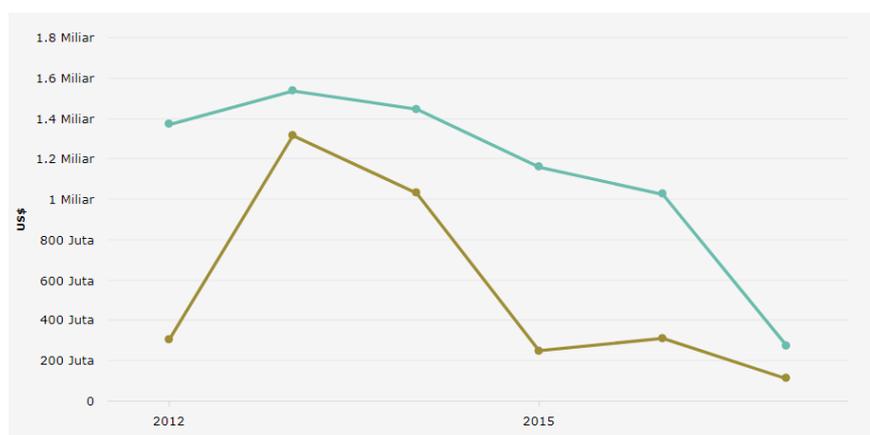
Adapun di bidang perdagangan juga tidak mengalami respon positif terhadap kedua negara. Seperti diketahui, perdagangan Indonesia-

Turki terus mengalami penurunan sejak 2014 hingga 2016. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan perdagangan kedua negara pada 2013 mencapai US\$ 2,85 miliar atau sekitar Rp 34,9 triliun, tapi pada 2016 tinggal US\$ 1,02 miliar. Namun, Indonesia selalu mencatat surplus perdagangan dengan Turki.

Penurunan perdagangan kedua negara terbesar pada 2015 mencapai 43 persen menjadi US\$ 1,4 miliar dari tahun sebelumnya. Di mana ekspor Indonesia turun hampir 20 persen menjadi US\$ 1,16 miliar dan impor dari Turki anjlok hampir 76 persen menjadi US\$ 249,8 juta. Sementara sepanjang triwulan I 2017, perdagangan Indonesia-Turki mencatat pertumbuhan 2,8 persen menjadi US\$ 386,9 juta dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. (KataData, 2017)

Gambar 4.2

Nilai Ekspor-Impor Indonesia-Turki 2012-Maret 2017



Sumber : Data dari Kemendag, diolah oleh Kadadata Indonesia

Untuk itu Presiden Jokowi beserta rombongannya melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki pada Rabu 05 Juli 2017, sekaligus ini

merupakan salah satu bentuk kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Erdogan yang datang ke Jakarta pada tahun 2015. Adapun agenda yang dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut adalah membahas mengenai peningkatan kerjasama ekonomi dalam investasi maupun perdagangan serta industri strategis.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Turki dalam upaya untuk meningkatkan tren investasi dan perdagangan Indonesi-Turki menjadi positif. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan investasi maupun perdagangan tidak cukup baik. Untuk itu diperlukannya beberapa terobosan baru dari kedua belah pihak untuk bisa mengatasi permasalahan yang menghambat investasi maupun perdagangan.

Dari hasil pertemuan bilateral tersebut dapat dihasilkan beberapa kesepakatan kerjasama baru yang dilakukan oleh Indonesia dengan Turki. Seperti melalui negosiasi *Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IT-CEPA), kemudian pengurangan atau pengakhiran hambatan perdagangan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan tren perdagangan dan investasi ke arah yang positif.

*Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IT-CEPA) merupakan sebuah forum dimana mempertemukan perwakilan antar kedua negara untuk membicarakan mengenai permasalahan yang menghambat investasi maupun perdagangan kedua negara, serta menemukan solusi terkait permasalahan yang di temukan

yang kemudian akan disampaikan oleh kepala negara untuk dilakukan penindakan. IT-CEPA ini sangat penting untuk Indonesia dikarenakan dapat meningkatkan daya saing di pasar Turki dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang sudah memiliki perjanjian dagang terlebih dahulu dengan Turki.

Misalnya saja hubungan Turki dengan Malaysia yang sudah sejak 2015 memiliki Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) yang mampu menggerus pasar Indonesia. lewat perjanjian tersebut, ekspor Malaysia ke Turki pada tahun 2016 terbukti mengalami pelonjakan hingga 49,11%. Sebaliknya, pada saat yang sama ekspor Indonesia ke Turki mengalami penurunan mencapai 13,03%. Hal ini terasa pada perdagangan minyak sawit (CPO), jika pada tahun 2014 pangsa pasar minyak sawit Indonesia di Turki mencapai 64,71%, tahun lalu kemudian anjlok tersisa 1,32% pada 2016. Pangsa pasar minyak kelapa sawit tersebut digantikan oleh produk Malaysia yang pangsa pasarnya dari 34,56% menjadi 97,87%. (Validnews, 2017)

Adapun produk ekspor Turki ke Indonesia yang utama adalah tepung terigu, bahan kimia, peralatan elektrik, produk besi dan baja, katun dan benang, karpet, dan tembakau. Sedangkan ekspor utama Indonesia ke Turki terdiri dari minyak kelapa sawit dan turunannya, karet alam, produk tekstil, kimia, kertas dan karton, tabung televisi, alas kaki, keramik untuk makan dan minum, kayu, mebel, serta peralatan dan perlengkapan elektrik.

Untuk itu apa yang di lakukan oleh Presiden Jokowi saat berkunjung ke Turki memang sudah tepat dilakukan, hal ini untuk menjaga pangsa pasar Indonesia di Turki agar mampu bersaing dengan negara lain. Pada pertemuan tersebut Presiden Jokowi diketahui telah berhasil membawa beberapa kesepakatan investasi sebesar US\$520 juta dengan Turki. Angka kesepakatan investasi tersebut diperoleh dari penandatanganan nota kesepahaman dua Badan Usaha Milik Negara Indonesia dengan Turki, yakni PT PAL dengan Karadeniz Holding, perusahaan Turki yang bergerak di bidang energi dan pembangkit listrik senilai US\$320 juta dan kesepakatan PT Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industry senilai US\$200 juta.

Kesepatan antara PT PAL dengan Karadeniz Holding adalah untuk membuat *power ship* yang sesuai dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah terpencil serta memenuhi target 35 ribu MW. Kesepakatan untuk membuat *power ship* merupakan peluang yang sangat potensial untuk dilakukan oleh kedua perusahaan, mengingat kedepanya kebutuhan akan konsumsi listrik akan semakin meningkat dan diperlukannya upaya untuk memenuhi kebutuhan dari tingkat nasional sampai regional. Sementara itu kesepakatan antara PT Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industry mencapai tiga hal utama. Yakni kerjasama di bidang *Marketing & production Extention of N219*, *Joint Development and Production of N245* serta *UAV-ANKA Marketing & Production Extention* terutama ekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. (Pasopati, 2017)

Yang perlu diketahui bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Turki dalam upaya menyaksikan penandatanganan dua perjanjian antar menteri kedua negara, yakni yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Turki, serta Kementerian Perdagangan Indonesia dengan Kementerian Perekonomian Turki. Kemudian setelahnya dilakukan penandatanganan Perusahaan Indonesia dengan Perusahaan Turki.

## **2. Kerjasama pengembangan industri pertahanan**

Salah satu hal yang menjadi kepentingan Indonesia melakukan kerjasama dengan Turki adalah untuk pengembangan industri pertahanan. Salah satu tujuannya adalah untuk peningkatan ilmu pengetahuan, memodernisasi dan produksi alat-alat pertahanan serta pertukaran informasi seperti memodifikasi pesawat patroli maritim, produksi tank tipe medium dan untuk mendapatkan komponen suku cadang pesawat tempur.

Kerjasama industri pertahanan dimulai ketika Presiden SBY melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki atas undangan dari Presiden Turki pada tanggal 28 Juni – 1 Juli 2010. Kemudian dalam kunjungan tersebut dibahaslah beberapa poin kerjasama antara Indonesia dan Turki. Hasil kunjungan tersebut menghasilkan delapan perjanjian kerjasama terkait di bidang Industri Pertahanan, Tenaga Kerja, Industri Kecil dan Menengah, Pertukaran Program dan Berita, Kerjasama Teknik, dan Kerjasama Penanaman Modal. (Wulandari, 2016)

Dari delapan perjanjian tersebut yang paling banyak disorot adalah mengenai perjanjian industri pertahanan. Perjanjian kerjasama industri pertahanan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Indonesia dengan Menteri Pertahanan Turki memuat beberapa poin utama adalah tentang bidang-bidang kerjasama yang akan dijalani, pembentukan komite bersama, prinsip-prinsip pelaksanaan, perlindungan hak dan kekayaan intelektual, perlindungan informasi, dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat rahasia. Namun, setelah penandatanganan kerjasama tidak semerta-merta dapat langsung dilaksanakan pengembangan industri pertahanan. Hal ini dikarenakan diperlukannya ratifikasi pembentukan UU kerjasama industri pertahanan.

Hingga UU kerjasama industri pertahanan dengan Turki baru di sahkan pada tahun 2014 ketika menjelang selesainya kepemimpinan SBY, dan baru dilakukan pelaksanaannya ketika memasuki kepemimpinan Jokowi. Komitmen pemerintah dan atas perintah UU maka Presiden Jokowi harus tetap melaksanakannya untuk bekerjasama dengan Turki dalam pengembangan industri pertahanan.

Hasil konkret dari hubungan kerjasama industri pertahanan dengan Turki menghasilkan Tank kelas Menengah Kaplan MT. Tank yang diproduksi bersama antara Indonesia dan Turki yang dikembangkan oleh FNSS dan PT Pindad Indonesia. Tahap pertama pembuatan desain tank medium selesai pada 2016 dan kemudian diluncurkan oleh Kementerian Pertahanan di pameran *Indo Defence Expo and Forum 2016*. Kemudian pada tahap kedua memasuki pemroduksian mulai dari badan tank yang

dilaksanakan di Turki yang kemudian di sempurnakan di Indonesia. Secara bersamaan juga pemerintah Indonesia telah mengirimkan sekitar 50 orang untuk dilatih membuat Tank Medium Kaplan. (Lubis, 2017)

Adapun klasifikasi Tank Medium Kaplan yang memiliki berat 15 ton memiliki beberapa klasifikasi, diantaranya adalah memiliki kemampuan daya gempur yang luas mulai dari perlindungan jarak dekat untuk pasukan infantri hingga pertempuran antar kendaraan tempur, selain itu tank medium juga mampu melesat hingga 70 kilometer (km) per jam dengan jarak tempuh maksimal sekali jalan 450 km. Tank medium dilengkapi dengan meriam kaliber 105 mm yang diadopsi dari *Cockerill Maintenance & Ingenierie SA Defence* dari Belgia dan 7.62 mm *Coaxial Machine Gun*. (Chandra, 2017) Dengan spesifikasi tersebut, Kaplan MT sangat cocok untuk digunakan di wilayah geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan.

Dalam awal perencanaan produksinya, Kaplan MT akan diproduksi sebanyak 100 unit untuk memenuhi kebutuhan nasional Tentara Nasional Indonesia. Hal ini mengacu pada tujuan awal dilakukannya kerjasama adalah untuk memenuhi kebutuhan alusista nasional, dan ketika kebutuhan nasional tercukupi maka produk Kaplan MT akan dijual ke beberapa negara yang membutuhkan. Perlu diketahui bahwa semenjak peluncurannya, Kaplan MT sudah banyak diminati oleh pasar mancanegara. Dengan adanya peminat terhadap produk ini, maka akan dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia di bidang alusista yang hasilnya akan menambah pendapatan negara.

Selain pembuatan Tank Medium Kaplan, Indonesia – Turki juga berhasil menyepakati untuk bekerjasama dalam pembuatan Kapal Selam dan pesawat tanpa awak. Pembuatan kapal selam dan pesawat tanpa awak bersama merupakan salah satu hasil dari pertemuan bertajuk *The 6th Defence Industry Cooperation Meeting*. Dalam pertemuan tersebut pihak Turki menawarkan kerjasama pembuatan kapal selam dan *unmanned aerial vehicle* (UAV) kelas *medium-altitude long endurance* (Male) dan *Controle system* atau pesawat tanpa awak. (Erdianto, 2017)

Kerjasama yang erat antara Indonesia dengan Turki di bidang industri pertahanan, membuktikan bahwa Turki benar-benar serius dan komitmen untuk mengembangkan industri pertahanan Indonesia hingga dapat mencapai kemandirian nasional. Turki merupakan negara yang maju dalam teknologi khususnya industri pertahanan membuat Indonesia memasukkan Turki sebagai salah satu prioritas untuk kerjasama pertahanan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh situs Global Fire Power pada tahun 2017, Turki berada pada peringkat ke-8 dunia. Sedangkan Indonesia masuk pada peringkat ke-14, yang merupakan peringkat yang sama pada tahun 2016.

**Tabel 4.1 Kekuatan Militer Dunia**

No	Negara	Power Indeks	Afiliasi
1	US	0.0857	North America, NATO, Apacific
2	Russia	0.0929	Apacific, EasternEuro, Asia
3	China	0.0945	Apacific, Asia
4	India	0.1593	Apacific, Asia
5	France	0.1914	Europe, NATO, European Union
6	UK	0.2131	Europe, NATO, European Union
7	Japan	0.2137	Apacific, Asia
8	Turkey	0.2491	Middle East, NATO, Balkan, Asia
9	Germany	0.2609	Europe, NATO, European Union
10	Egypt	0.2676	Africa, Middle East
11	Italy	0.2694	Europe, NATO, European Union
12	South Korea	0.2741	Apacific, Asia
13	Pakistan	0.3287	Apacific, Asia
14	Indonesia	0.3287	Apacific, Southeast Asia
15	Israel	0.3476	Middle East, Asia

Sumber : Global Fire Power

Apabila melihat daftar tabel tersebut, maka sudah menjadi pilihan yang tepat Indonesia menjalin kerjasama dengan Turki. Turki yang sudah di kenal sejak lama akan kemampuan militernya yang cukup mumpuni, baik dari personil maupun teknologi pertahanan yang di pakai. Dengan melakukan kerjasama pengembangan teknologi industri militer dengan Turki, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang banyak khususnya pada transfer teknologi. Dengan semakin membaiknya teknologi yang dimiliki Indonesia, maka akan menjadi nilai plus untuk pertahanan nasional.

Untuk itu, pada pemerintahan Presiden Jokowi perlu menjaga hubungan baik dengan mitra negara Turki. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mencapai kemandirian industri militer, memodernisasi alusista nasional, serta sebagai upaya untuk membantu perekonomian nasional.

### **C. Faktor Kondisi Konteks Internasional**

Kondisi konteks lingkungan internasional akan mampu mempengaruhi politik internasional sebuah bangsa dalam menjalankan politik luar negerinya ke negara lain atau komunitas internasional. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini berada pada posisi yang di perhitungkan oleh negara lain. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dapat menguntungkan Indonesia untuk melakukan hubungan bilateral dengan negara manapun dan dapat menentukan arah kebijakan politik luar negerinya sendiri.

Letak Indonesia secara geografis yang berada pada pertemuan antara dua benua dan dua samudra, serta posisinya yang berada pada jalur utama perdagangan Asia-Pasifik membuat Indonesia menjadi negara yang penting untuk negara lain. Indonesia juga di untugkan banyak untuk dari letak geografis tersebut, misalnya dapat bergabung dalam organisasi regional.

Tabel 4.2

## Keanggotaan Indonesia di Tingkat Regional maupun Kawasan

No	Nama Organisasi	Status	Tahun Bergabung
1	ASEAN	Anggota	1967
2	APEC	Anggota	1989
3	ASEAN Foundation	Anggota	1997
4	IOMAC	Anggota	1993
5	ASIA-EUROPE Foundation	Anggota	1997
6	GNB	Anggota	1961

Sumber : Data Kementerian Luar Negeri Indonesia

Selain bergabung pada tingkat komunitas regional, Indonesia juga bergabung pada komunitas internasional lainnya. Adapun beberapa organisasi internasional yang di ikuti oleh Indonesia diantaranya adalah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), WTO, D-8, G-77, G-15, G-20, dan OIC. Keaktifan Indonesia pada organisasi tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang mampu berkontribusi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Hal inilah yang membuat negara lain ingin melakukan kerjasama yang erat dengan Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang diperhitungkan dalam perpolitikan global.

Karena posisinya yang semakin strategis itu pula, Indonesia juga bisa melakukan pertimbangan kerjasama dengan negara lain berdasarkan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia. Dalam kasus penelitian ini, maka Turki merupakan salah satu negara yang layak untuk dijadikan mitra strategis Indonesia.

Seperti yang diketahui bahwa Turki merupakan salah satu negara yang besar di kawasan Eurasia. Karena letaknya tepat berada di Eurasia, maka Turki dapat memerankan posisi politik luar negerinya terhadap kawasan Eropa maupun Asia. Posisi Turki tersebut mampu menjadikannya sebagai penghubung antara Eropa dan Asia untuk jalur utama perdagangan darat. Hal ini tentu membuat Turki menjadi negara yang ekonominya maju di dunia. Selain itu, Turki juga merupakan salah satu negara yang mendirikan organisasi internasional seperti PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), OECD, dan OSCE dan juga negara anggota Dewan Eropa dan NATO.

Dengan latar belakang seperti itu, membuat Turki layak untuk dijadikan mitra strategis bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat sejumlah kesamaan antara Indonesia dan Turki adalah sebagai berikut; Pertama, Indonesia dan Turki merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar dengan sistem negara yang demokratis memberikan keuntungan pasar yang besar. Kedua, Indonesia dan Turki sama-sama berada pada letak geografis yang strategis dengan Indonesia berada pada pertemuan dua benua Asia-Australia dan Samudra Hindia-Pasifik, sedangkan Turki berada pada pertemuan antara benua Eropa dan Asia yang dapat memberikan keuntungan pada jalur perdagangan. Ketiga, Indonesia dan Turki merupakan negara yang tergabung kedalam organisasi internasional seperti PBB, OKI, D-8, serta G-8. Keempat, Indonesia dan Turki aktif dalam berbagai isu internasional seperti, mendukung kemerdekaan Palestina, menentang adanya aksi terorisme, dan mendukung perdamaian di Rohingya Myanmar.

Hubungan Indonesia dan Turki yang baik itu dapat dilihat dengan dilakukannya kunjungan Presiden Turki ke Indonesia pada tahun 2015, kemudian di balas oleh Presiden Jokowi dengan melakukan kunjungan ke Turki pada tahun 2017. Pada saat Presiden Jokowi berkunjung ke Turki membahas beberapa poin, seperti kerjasama pemberantasan terorisme, kerjasama ekonomi komprehensif, serta peningkatan industri strategis. (Soepardi, 2017)